

**PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
(DI TINJAU DARI ASPEK KEADILAN)**

JURNAL



Oleh:

REYNOLD SIMANDJUNTAK

0920101025

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (DI TINJAU DARI ASPEK KEADILAN)

Reynold Simandjuntak
Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Negeri Manado
Alamat : Jl. Kampus Unima – Tondano 95618
Telp (0431) 321845, 321846, Fax (0431) 321866
Email reynoldsim72@yahoo.com

Abstract

TAX DISPUTE RESOLUTION VIEWED FROM EQUITY ASPECT

Tax is a source of cash revenue for the country which is then used for development with the final aim of the welfare and prosperity of the people. Tax is one source of cash income is used for the construction of the state with the ultimate goal of the welfare and prosperity of the people. The purpose of this study is to determine the procedure and substance of the tax dispute resolution arrangements in terms of aspects of justice.

Research type is normative law research. It means that the research reviews the topic with several materials such as primary law material, secondary law material and tertiary law material. Some approaches are used such as (a) statute approach, (b) conceptual approach, and (c) historical approach. The primary, secondary and tertiary law materials are collected and classified, and after this, it is then processed qualitatively and analyzed in analytical descriptive manner. The result is described with systematic review such that an appropriate and logical conclusion can be made based on the discussed problem.

Tax dispute procedure is related to equity aspect. It seems that tax dispute resolution procedure is only resolvable through Tax Court because Tax Court is an instrument that is useful for the seeker of equity to protect the interest of taxpayer.

Tax Court is a judicature institution as a legal structure for the people as taxpayer or tax underwriter to obtain equity in the taxation affair (pursuant to Article 2 of Act No. 14 of 2002 about Tax Court). The legal substances of tax dispute resolution based on equity aspect include Article 36 Verse (1) letter a of UU KUP and Article 36 Verse (2) letter b of UU KUP. The dispute between taxpayer and the Fiscus is usual event but the right of taxpayer to complain may pass the date (expired). In the Appeal Court, the complainant (taxpayer) in Tax Court is made difficult by fiscus (government) because tax collection system in Indonesia is self assessment. Given the considerations made in the tax in principle, should pay attention to fairness and validity of the implementation, so that the demands of justice and the validity of the principle of taxation should be noted, the principle of equality which emphasizes the importance of balance based on the ability of each subject to tax.

Key words: *arrangement, tax dispute resolution, equity*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menentukan prosedur dan substansi pengaturan penyelesaian sengketa pajak ditinjau dari aspek keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Artinya, pengkajian didasarkan pada pengumpulan bahan-bahan yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Melalui metode pendekatan : a. perundang-undangan (*statute approach*) ;b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*); dan c. Pendekatan historis (*historical approach*). Setelah bahan-bahan hukum, primer, sekunder, tersier terkumpul dan terklasifikasi, selanjutnya dilakukan pengolahan secara *kualitatif* dan kemudian dianalisis secara *deskriptif analitik*, selanjutnya didiskripsikan dengan cara pemaparan secara sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang tepat dan logis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Prosedur penyelesaian sengketa pajak jika dikaitkan dengan asas *equity* (keadilan), tampak bahwa prosedur penyelesaian sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, mengingat Pengadilan Pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni untuk melindungi kepentingan wajib pajak.

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan (sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Adapun substansi aturan penyelesaian sengketa pajak apabila ditinjau dari aspek keadilan (*equity*) antara lain : Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP; dan Pasal 36 Ayat (2) huruf b UU KUP. Dalam hal ini ada persengketaan antara Wajib Pajak dengan Fiskus tetapi hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sudah lewat (daluarsa). Bahkan dalam tingkat banding, Pemohon keberatan (Wajib Pajak) dalam pengadilan pajak kadang justru dipersulit oleh pihak *fiscus* (Pemerintah) mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*. Mengingat pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya, sehingga tuntutan keadilan dan keabsahan perlu diperhatikan asas pemungutan pajak, asas *equality* yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak.

Kata kunci: pengaturan, penyelesaian sengketa pajak, keadilan

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi¹. Salah satu perubahan menonjol dalam reformasi sistem perpajakan nasional adalah perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*². Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak dalam sistem *self assessment* ini sudah sewajarnya diimbangi dengan instrument pengawasan agar kepercayaan itu tidak disalah gunakan wajib pajak. Untuk keperluan itu diciptakan wewenang bagi fiskus untuk melakukan pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih dengan dilaporkan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuannya menimbulkan koreksi, maka fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) mempunyai kedudukan sama dengan Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)³.

Dalam praktek seringkali terjadi wajib pajak tidak menyetujui besarnya jumlah pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana yang tertuang dalam SKP. Perbedaan perhitungan antara fiskus dan wajib pajak inilah merupakan salah satu sebab timbulnya suatu sengketa pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pajak dikaitkan dengan asas *equity* (keadilan),
2. Apakah substansi aturan penyelesaian sengketa pajak ditinjau dari aspek keadilan (*equity*)

Tulisan ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Artinya, pengkajian didasarkan pada pengumpulan bahan-bahan yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier⁴. Bahan hukum primer adalah Peraturan Perundang-undangan bidang perpajakan di Indonesia, seperti Undang-undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil penelitian para ahli hukum, serta jurnal atau makalah hukum. Dan bahan hukum tersier adalah berupa kamus-kamus, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris- Indonesia dan lainnya yang digunakan dalam penulisan ini.

Sebagai sebuah penelitian hukum bersifat *normatif*, maka dapat memberikan pemahaman mengenai persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik akan digunakan beberapa pendekatan, yakni a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; peradilan pajak; penyelesaian pajak, dan lain-lain berkaitan permasalahan. b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

¹ Bohari.,H., 2004, **Pengantar Hukum Pajak**, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Departemen Keuangan RI., 1993, **Peranan Pajak Dalam Pembangunan**, Direktur Jenderal Pajak, Jakarta, hlm. 11.

³ Bohari.H., 2004, Op.Cit., hlm. 118.

⁴ Sunaryati hartono, 1994, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20**, Alumni, Bandung, hlm. 131-141.

dimaksudkan untuk mengkaji konsep berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak. c. Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan historis ini digunakan dalam kerangka pelacakan terhadap sejarah pengaturan dan penerapan perpajakan di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam hal ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dapat berupa sumber bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan bidang perpajakan, ; Pengadilan Pajak. Sedangkan Bahan hukum sekunder berupa buku-buku; hasil penelitian ahli hukum; jurnal atau makalah-makalah hukum; *Website* (internet). Juga di dukung dengan bahan hukum tersier yakni berupa kamus-kamus seperti kamus hukum maupun kamus bahasa Inggris-Indonesia. Penelitian ini juga didukung oleh bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yakni berupa dokumen-dokumen dari instansi terkait dengan permasalahan.

Metode Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara membaca; mengklasifikasi bahan hukum sekunder maupun primer dari penelitian kepustakaan (*library research*). Maupun sumber bahan hukum yang dikumpulkan dari *field research* dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibuat.

Setelah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier terkumpul dan terklasifikasi, selanjutnya dilakukan pengolahan secara *kualitatif* dan kemudian dianalisis secara *deskriptif analitik*⁵ yaitu analitik atau analisa dimulai dari mengumpulkan, mengklasifikasi dan mensistematisasi selanjutnya mengkaji secara mendalam dan kemudian diuraikan atau didiskripsikan dengan cara pemaparan secara sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang tepat dan logis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pembahasan

1. Pengertian Sengketa Pajak

Sengketa pajak adalah perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perUUan di bidang perpajakan⁶. Biar pun terjadi perselisihan, tetapi salah satu pihak tidak melakukan sanggahan, maka tidak ada sengketa pajak. Atau dengan kata lain/ Intinya adalah Pajak yang terutang.

Selain itu, ada juga menyatakan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa⁷, hal

⁵ Sunaryati Hartono, 1994, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung, hlm. 131-141. Lihat pula Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 5 Dan Sorjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 18

⁶ Wirawan B.Ilyas&Richard Burton, 2004, **Hukum Pajak**, Edisi Revisi, salemba Empat, Jakarta, hlm. 10.

⁷ Muhammad Djafar Saidi, 2007, **Perlindungan Hukum Wajib pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

ini sesuai ketentuan Pasal 1 Angka (5), Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1.1 Asas Keadilan dalam Sengketa Pajak

Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang ditemukan oleh Adam Smith dalam bukunya :”*Wealth of Nation*”, seperti asas *equality*. Dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak⁸. Yang dimaksud dengan keseimbangan kemampuan subyek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subyek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subyek pajak sehingga dalam asas *equality* ini untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.

Memperhatikan keterkaitan asas keadilan (*equity*) dalam suatu sengketa pajak, tampak bahwa Keadilan (*Equity*) tidak bermaksud untuk mengubah atau mengurangi keadilan, melainkan sebatas memberikan koreksi dan atau melengkapi dalam keadilan individu tertentu, kondisi serta kasus tertentu. Melalui penerapan *equity* dalam praktik maka *maxim “summa iustitia summa iniuria”* tidak akan terjadi, karena dengan adanya *equity* pemberlakuan nilai keadilan dalam pemungutan pajak, hubungan antara pemungut pajak dengan individu atau pihak yang diwajibkan pajak pada proporsi yang sewajarnya.

1.2 Cara Penyelesaian Sengketa Pajak

Dalam pembahasan cara penyelesaian sengketa pajak ini, diawali dengan membahas mengenai aturan aturan yang berkaitan dengan perpajakan itu sendiri maupun tahapan - tahapan proses dalam penyelesaian sengketa pajak, antara lain:

Pembetulan ketetapan pajak

Pembetulan ketetapan pajak di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP Tahun 1984, yang pada prinsipnya mengatur pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan

⁸ Muhammad Djafar Saidi, 2007, **Perlindungan hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34.

Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain : menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi⁹

Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP Tahun 1984 mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administrasi yang dikurangkan atau dihapuskan tersebut dapat berasal dari ketetapan pajak atau surat tagihan pajak

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP Tahun 1984, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya dengan satu surat untuk satu ketetapan pajak; menyebutkan jumlah pajak terutang menurut WP.
2. Keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus dikeluarkan oleh Dirjen Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktu ini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Keberatan

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

⁹ Perhatikan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 8 Tahun 1984 tentang **pajak Pertambahan Nilai**.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan /pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Keberatan hanya dapat diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila surat keberatan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat keberatan. Tanda penerimaan Surat Keberatan diberikan Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

Apabila diminta Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, maka Dirjen Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, dan Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Dirjen Pajak tidak memberikan jawaban, maka keberatan dianggap diterima.

Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak

Keputusan Dirjen Pajak dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak terutang.

Banding

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keputusan yang dapat diajukan banding adalah surat keputusan keberatan dalam hal WP belum puas dengan keputusan tersebut¹⁰.

Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit atau apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, pefeburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, **Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 117-119.

dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

1. menolak;
2. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. menambah Pajak yang harus dibayar;
4. tidak dapat diterima;
5. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
6. membatalkan.

Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi.

Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masalah gugatan pajak, khususnya berkaitan dengan Penagihan pajak, telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 jo UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa¹¹. Upaya hukum gugatan tersebut dalam undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa diatur dalam Pasal 37.

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan¹².

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

1. menolak;
2. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. menambah Pajak yang harus dibayar;
4. tidak dapat diterima;
5. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
6. membatalkan.

Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi

Peninjauan Kembali

Dalam Hukum Acara yang berlaku di lingkungan peradilan di Indonesia, upaya hukum berupa peninjauan kembali dikenal sebagai upaya hukum luar biasa. Tidak semua sengketa atau perkara dapat begitu saja diajukan upaya hukum ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, upaya

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, **Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 125.

¹² Ibid. hlm. 128.

hukum peninjauan kembali diatur dalam Bab IV Bagian Kesepuluh mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali, yakni dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 93¹³.

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi¹⁴.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut¹⁵:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau leblh dari pada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

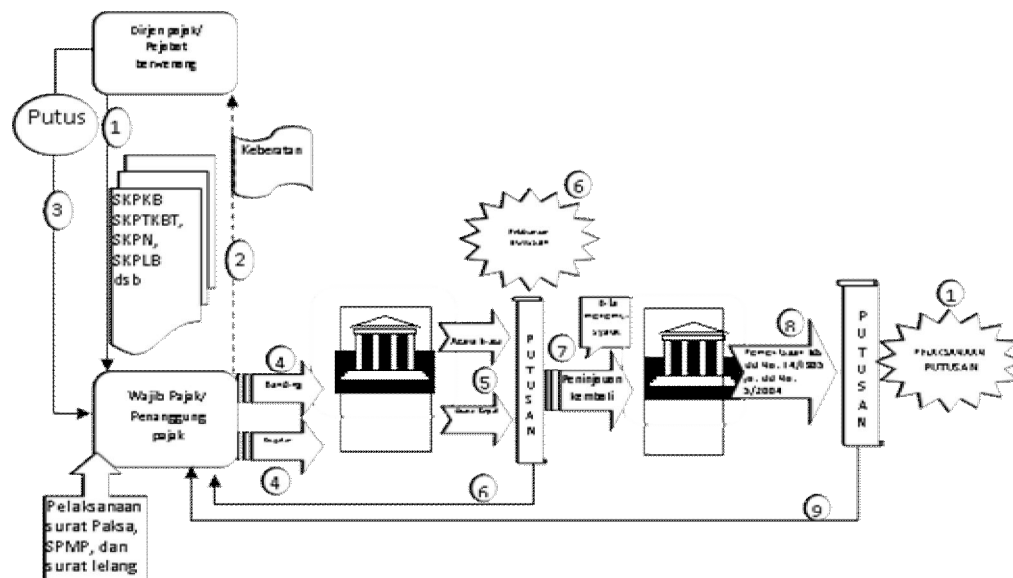
Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

¹³ Ibid. hlm. 196-197.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid. hlm. 200-202.

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak



Keterangan :

1. Penyampaian SKPKB, SKPKBT, SKPLB dsb. dari pejabat yang berwenang kepada wajib pajak
2. Keberatan dari wajib pajak (3 bulan)/sesuai ketentuan
3. Putusan atas keberatan (12 bulan)/sesuai ketentuan
4. Pengajuan banding (3 bulan). 4a. gugatan (14 hari)
5. Pemeriksaan dengan acara biasa (12 bulan untuk banding acara biasa, 6 bulan untuk gugatan acara biasa, atau 3 bulan untuk hal khusus) atau acara cepat (30 hari).
6. Penyampaian putusan pengadilan pajak ke wajib pajak (30 hari)
7. Permohonan peninjauan kembali (3 bulan)
8. Pemeriksaan permohonan PK (6 bulan terhadap putusan acara biasa, 1 bulan terhadap putusan acara cepat)
9. Penyampaian putusan PK ke wajib pajak / penanggung jawab
10. dan 6.a. pelaksanaan putusan (30 hari)¹⁶

Penyelesaian sengketa pajak jika dikaitkan dengan asas *equity* (keadilan), yaitu diawali dengan memperhatikan upaya hukum penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan fiscus, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu : Bentuk penyelesaian Sengketa pajak yang diatur dalam Pasal 36 UU KUP (terdiri dua ayat). Berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 16 dan Pasal 23. Pasal 36 UU KUP ini sejak UU No. 8 Tahun 1983 hanya mengalami satu kali perubahan yakni dalam UU No.16 Tahun 2000. Hal itu hanya perubahan terhadap Pasal 36 Ayat (2) dan perubahannya tidak menyentuh substansi tetapi hanya redaksional.

Penyelesaian diluar peradilan dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 yang mendefenisikan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”¹⁷.

¹⁶ Terkutip dari Y.Sri Pudyatmoko, op cit., hlm. 48.

¹⁷ Perhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase**.

Jika dikaitkan dengan sengketa pajak, upaya hukum diluar peradilan dapat dilaksanakan karena upaya hukum diluar peradilan pajak berupa hak yang boleh digunakan untuk mengoreksi perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pejabat pajak, dengan demikian hak wajib pajak sebagaimana ditentukan dalam upaya hukum pajak merupakan upaya hukum di luar peradilan pajak.

2. UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

A. Penyelesaian Sengketa Pajak Di Tinjau Dari Aspek Keadilan.

Dalam hal terjadi suatu sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak hal tersebut merupakan suatu proses dalam hukum pajak yang diharapkan dapat memberikan keadilan, baik bagi wajib pajak maupun kepada pemerintah sebagai pemungut pajak.

Pajak merupakan pungutan dari negara yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, karenanya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Keadilan dalam pemungutan pajak ini harus mencakup pembentukan perundang-undangannya, pengenaannya, pemungutannya, maupun dalam pembagian beban yang harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan, juga adanya saluran-saluran hukum yang terbuka bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dalam bidang perpajakan.

1. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-undang Perpajakan

Penyelesaian Sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak diselesaikan melalui dua bentuk penyelesaian. Pertama, penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni Dirjen Pajak. Pada pelaksanaannya, proses penyelesaian sengketa pajak yang diselesaikan Dirjen Pajak dilimpahkan wewenangnya ke Kepala Kanwil Ditjen Pajak (Kakanwil) di daerah. Dan kemudian, sebagian wewenang tersebut dilimpahkan ke masing-masing Kepala KPP di bawah Kanwil Ditjen Pajak sesuai dengan kebijakan masing-masing Kakanwil.

Pelimpahan wewenang penyelesaian sengketa pajak diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian bags setiap Wajib Pajak. Hal ini ditinjau dari kedudukan Kanwil Ditjen Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam UU KUP pengaturan penyelesaian sengketa pajak baik yang diselesaikan oleh Ditjen Pajak maupun oleh Pengadilan Pajak diatur dalam beberapa bab yang berbeda. Pasal 16 UU KUP atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

Sejak adanya Tax Reform Pasal 16 UU KUP ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu, perubahan pertama dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan perubahan kedua (saat ini berlaku) dengan UU No. 16 Tahun 2000. Jika ditinjau dari adanya perubahan tersebut dapat kita lihat bahwa adanya upaya untuk memperluas pengertian kekeliruan penerapan perundang-undangan perpajakan, dalam penjelasannya, kemudian dilanjutkan pada UU No.16 Tahun 2000 dengan menambah pembetulan tidak saja atas SKP dan STR. Sebenarnya perluasan pengertian tersebut ada hubungannya dengan adanya perubahan Pasal 14 UU KUP yang mengatur tentang STP.

Dengan demikian, fungsi dari STP untuk melakukan penagihan telah memiliki kejelasan & kepastian sehingga penerbitannya tidak menimbulkan ketidaksetujuan Wajib Pajak. Artinya, jika terdapat kesalahan dalam penerbitan STP hanya mungkin terjadi kesalahan manusiawi berupa salah tulis/salah hitung/ kesalahan penerapan tarif sehingga sarana pembetulanannya adalah Pasal 16 UU No.6 Tahun 1983. Atas dasar tersebut, UU KUP menentukan STP tidak dapat diajukan keberatan (Pasal 25 Ayat (1) UU KUP).

Jika diperbandingkan antara Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 maka rumusannya menjadi lebih luas. Sebagai bahan perbandingan, selanjutnya akan diuraikan rumusan Pasal 14 Ayat (1) menurut UU No. 6 Tahun 1983 (baru) dengan rumusan Pasal 14 Ayat (1) UU No.9 Tahun 1994 (lama).

Apabila dilihat dari rumusan Pasal 14 Ayat (1) UU No. 9 tahun 1994 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 adanya perubahan ini hanya memecah rumusan huruf e, menjadi huruf e dan f, maka secara substansi tidak ada perubahan mendasar.

2. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan penyelesaian sengketa pajak terdapat dua bentuk penyelesaian. Kedua bentuk tersebut menyebabkan ada perbedaan hukum acara masing-masing. Pertama, penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak (Banding dan Gugatan) maupun MA (Peninjauan Kembali) yang hukum acaranya secara khusus diatur dalam UU No.14 Tahun 2002 dan UU No.14 Tahun 1985. Kedua, penyelesaian sengketa pajak pada Dirjen Pajak (keberatan dan permohonan peninjauan) tidak terdapat pengaturan hukum acara secara khusus, bukan berarti tidak ada, tapi diatur dalam UU KUP dan perundang-undangan lain di bawahnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan di tingkat Dirjen Pajak maupun di tingkat Pengadilan Pajak. Penyelesaian harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang bersengketa terutama kepada Wajib Pajak. Di bawah dianalisis mekanisme penyelesaian yang diawali dari penyelesaian oleh Dirjen Pajak yang berkaitan dengan: persyaratan formal pengajuan keberatan, bentuk Surat Keputusan, dan jangka waktu penyelesaian. Setelah itu, mekanisme penyelesaian pada Pengadilan Banding yang berkaitan dengan: pelunasan utang pajak, jangka waktu pengajuan, dan isi putusan.

3. HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MAUPUN FISKUS

1) Sekilas Pengertian hak dan kewajiban pajak

Berbicara masalah pajak tentu tidak terlepas dari masalah hak dan kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak (WP) maupun fiskus. Untuk itu, perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya literatur pajak memandang hal demikian. Dalam literatur pajak, tidak pernah ada satu definisi atau pengertian yang menyebutkan bahwa pajak adalah hak masyarakat (rakyat). Bahkan, para ahli pajak seperti Prof. Adriani dan Prof. Rochmat Soemitro

selalu memberikan pengertian yang menyebutkan bahwa pajak bukanlah hak, tetapi kewajiban. Pengertian yang dijelaskan menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan.

2) Hak Wajib Pajak

Hak-hak WP yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiscus.
Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan.
- 2) Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan.
- 3) Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Hak mengajukan keberatan.
- 5) Hak mengajukan banding.
- 6) Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia WP.

3) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban WP yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

- 1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
- 2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 3) Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
- 4) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
- 5) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
- 6) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- 7) Kewajiban membuat Faktur Pajak.
- 8) Kewajiban melunasi Bea Meterai.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian sengketa pajak jika dikaitkan dengan asas *equity* (keadilan), yaitu diawali dengan memperhatikan upaya hukum penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan fiscus, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu : Bentuk penyelesaian Sengketa pajak yang diatur dalam Pasal 36 UU KUP (terdiri dua ayat). Berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 16 dan Pasal 23, Pasal 36 UU KUP ini sejak UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, hanya mengalami satu kali perubahan yakni dalam UU No.16 Tahun 2000. Hal itu pun hanya perubahan terhadap Pasal 36 Ayat (2) dan perubahannya tidak menyentuh substansi tetapi hanya redaksional saja. Disini tampak bahwa prosedur penyelesaian sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, mengingat Pengadilan Pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni untuk melindungi kepentingan wajib pajak.

1. Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan. Adapun substansi aturan penyelesaian sengketa pajak apabila ditinjau dari aspek keadilan (*equity*) antara lain Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP mengenai wewenang Dirjen Pajak untuk

mengurangkan/menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, oleh karena sanksi administrasi dikenakan kepada Wajib Pajak melalui sarana ketetapan pajak yakni SKP KB, SKP BT dan STP. Dan Pasal 36 Ayat (2) huruf b UU KUP, mengatur wewenang Dirjen Pajak mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, seharusnya dimasukan dalam atau bagian dari keberatan. Mengingat bahwa wewenang ini diberikan demi keadilan (memperhatikan *asas equity*) ketika Wajib Pajak ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal. Jadi sebenarnya ada persengketaan antara Wajib Pajak dengan Fiskus tetapi hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sudah lewat (daluarsa). Bahkan dalam tingkat banding, Pemohon keberatan (Wajib Pajak) dalam pengadilan pajak kadang justru dipersulit oleh pihak *fiscus* (Pemerintah) mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*. Mengingat pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut perlu diperhatikan asas pemungutan pajak yakni asas *equality* yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak.

Dalam kesempatan ini dapat dibuat saran sebagai berikut :

1. Perlu ada sosialisasi tentang ketentuan pajak dan penyelesaian sengketa pajak kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari perkara pajak maupun dapat melakukan penyelesaian sengketa pajak bagi rakyat atau instansi yang telah tertimpa sengketa pajak.
2. Perlu ada transparansi oleh pelaksana pemungutan pajak kepada fiscus agar terjadi pemahaman yang jelas dan tegas oleh fiscus, sehingga pajak dapat dibayarkan dengan lancar dan baik.
3. Perlu ada riset lanjutan, berkaitan dengan penyelesaian pajak mengingat perkembangan ilmu perpajakan dewasa ini dan mendatang sesuai era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Kadir Mohammad, 2001, **Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra aditya bhakti, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, **Filsafat Hukum**, Yogyakarta, Gadjah mada University Press.
- Agus Yudha Hernokko, 2010, **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, P.T Kencana, Jakarta.
- Bohari,H., 1995, **Pengantar Hukum Pajak**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Djafar Saidi., Muhammad., 2007, **Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Keuangan RI, **Peranan pajak dlm pembangunan**, Direktur Jenderal Pajak 1998.
- E. Sumaryono, 1995, **Etika Profesi Hukum**, Yogyakarta, Pn. Kanisius.
- _____, 2002, **Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas**, Yogyakarta, Pn. Kanisius.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, **Menggapai Hukum Berkeadilan**, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, Pn. Buku Kompas.
- Hussein Kartasasmita, 1985, **Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan 7984**, Jakarta, Yayasan Bina Pajak.
- Jazim Hamidi & Mariyadi Faqih, 1999, **Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia (Berdasarkan UU No. 17 Tahun 1997)**, Tarsito Bandung.
- John Rawls, 1971, **A Theory of Justice**, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard, University Press.
- _____, 2011, **A Theory of Justice: Teori Keadilan**, Cetakan Kedua, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kuntjoro Purbopranoto,1981, **Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia**, Bina Cipta, Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati, **Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 – 1990**, 2004, Surakarta, Universitas Muhammadiyah.
- Keren Lebaccqz, 1986, **Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Pemikiran J.S.Mill; John Rawls., R. Nozick; R.Niebuhr; Jose Poforio Miranda**, Pn. Nusa Media, Bandung
- Koeseomahatmadja, RDH., 1975, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Alumni, Bandung.
- L.A. Sheridan, 1963, **Constitutional Protection Expropriation and Restriction on Property Rights**, Oceana Public Ink.
- Munir Fuady, 1999, **Hukum Pailit 1998 dalam teori dan praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Daud Ali, 2007, **Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Emelia Retno, **Jurnal Hukum Pro Justitia,juli 2007**,volume 25 ., No 3.
- O Notohamidjoyo, Masalah: Keadilan, Tirta Amerta, Semarang, 1971.

- Philipus M.Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, Jakarta: Bina Ilmu,.,
- _____.1995, **Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa ini, Kontroversi Yuridis Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak**, Makalah Seminar.
- Rochmat Soemitro, 1990, **Asas dan Dasar Perpajakan.**, jilid I Eresco, Bandung.
- _____, 1991, **Asas-Asas Hukum Perpajakan**, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1976, **peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia**, Cetakan IV. PT. Eresco, Jakarta-Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo, 1991, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Eresco Bandung.
- R. Tresna, 1978, **peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, Pradnya paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1983, **sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung.
- Sunindhia, YW., dan Ninik Widiyanti, 1990, **Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sorjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soetaridyo Wignjosoebroto,1994, **Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 1995, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjachran Basah, SH.CN., 1997 **Eksistensi dan Tolok ukur badan peradilan Administrasi di Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Utrecht, 1962, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, PT. Ichtiar, Jakarta.
- Wiratni Ahmadi, 1996, **Pajak Tanah Sebagai Upaya Sinkronisasi Kebijaksanaan Pengenaan Pajak Tanah dan Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia**, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- Yusuf Qhardawi, 1997, **Norma dan Etika Ekonomi Islam**, Gema Insani Press, Jakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko., 2009, **Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak**, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Putusan Pengadilan Pajak No. Put.00556/PP/M.II/16/2003 tanggal 24 Januari 2003
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Perkara Nomor 30/PUU-/2012 perihal Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet :

MAPPI FHUI/ Lembaga paksa bdn dlm pengadilan pajak, www.pemantau-peradilan.com.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang **Badan Penyelesaian Sengketa Pajak**.

_____, UU No. 28 Tahun 2007 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.

_____, UU No. 14 Tahun 2002 tentang **Pengadilan Pajak**.